

FENOMENA MODERNISASI DI INDONESIA: MEMBANGUN TRUST SOCIETY MELALUI KAPITAL SOSIAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM

Oleh

H. Catur Wahyudi

FISIP Universitas Merdeka Malang

ABSTRAK

Kapital sosial selain menjadi norma, juga menjadi kepercayaan sosial dan juga sebagai pertukaran menjadikan entitas masyarakat semakin menguatkan kelompok masyarakat tersebut. Keberadaan sosial kapital dalam lingkungan masyarakat mampu membentuk entitas masyarakat tersebut menjadi lain dengan lingkungan lainnya. Modernisasi yang terus berkembang terus menjadi pendorong dalam pengikisan terhadap norma-norma yang berlaku dalam komunitas masyarakat. Oleh sebab itu trust society yang telah terbentuk harus terjaga oleh satu struktur kapital sosial yang mapan. Islam memandangnya sebagai kondisi masyarakat madani. Dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang notabene memeluk agama Islam, kapital sosial telah terbentuk dalam interaksi masyarakat. Zakah, infaq, dan sedekah yang dianjurkan oleh Islam menjadi rutinitas sosial serta rutinitas spritual bagi masyarakat. Oleh sebab itu, kerukunan dan kegyuban masyarakat tekelompok dalam kelompok-kelompok yasinan maupun tahlilan, dan lain sebagainya.

Kata Kunci : *Modernisasi, Kepercayaan Sosial, Society, Kapital Sosial.*

PENDAHULUAN

Popularitas konsep kapital sosial (*social capital*) pada beberapa tahun terakhir mewarnai dinamika perspektif di kalangan pemerhati ilmu-ilmu sosial, khususnya di kalangan pengembang teori-teori sosiologi. Sebelumnya telah dikenal berbagai bentuk kapital, yaitu *natural capital*, *financial capital*, *physical capital*, *human capital*, dan *human made capital* (*producced assets*). World Bank (The World Bank, 1998) memaknai *social capital* sebagai “...a society includes the institutions, the relationships, the attitudes and values that govern interactions among people and contribute to economic and

social development”. Aplikasi *social capital* terkait masalah sosial menurut Lawang (2005: 88-89) bersifat multiguna (*multi-purpose*) dan multi pespektif, sebab kemampuan praksis dari kapital sosial selalu bersama-sama dengan kapital lainnya untuk mengatasi masalah sosial secara berdaya guna, seperti kemiskinan, ketidakberdayaan, marginalitas, dimana nilai kapital dari kapital sosial selalu diperhitungkan bersama-sama dengan kapital lainnya.

Sementara itu, modernisasi memiliki potensi yang dapat melemahkan atau sebaliknya menguatkan kapital sosial. Ibnu

Khaldun (1332-1406 M) melihat fenomena modernisasi sebagai perkembangan peradaban, merupakan hasil dari proses *tamaddun* (semacam transformasi pemikiran yang lebih sehat), lewat *ashabiyah* (*group feeling*), perwujudan kompleksitas produk pikiran kelompok manusia yang mengatasi negara, ras, suku, atau agama, yang membedakannya satu dengan lainnya, kendatipun tidak monolitik dengan sendirinya. Sejalan dengan hal itu, makalah ini akan menyajikan fenomena potensi modernisasi dalam kapital sosial yang dibangun melalui nilai-nilai ke-Islam-an. Untuk itu, perlu dikaji terlebih dulu bagaimana konsep Islam tentang kapital sosial, agar fenomenanya dapat digali dari berbagai contoh kasus yang ada di Indonesia.

REVIEW KONSEP KAPITAL SOSIAL DALAM KHASANAH MODERNISASI

Literatur yang banyak dikutip terkait dengan konsep kapital sosial adalah artikel klasik James Coleman (2000: 13-39) ketika berbicara tentang fungsi dan struktur dalam menjelaskan konsep kapital sosial, pertanyaan yang hendak dijawab adalah apakah determinisme yang terkandung dalam struktur sosial itu demikian absolut menentukan tindakan manusia? Jawaban Coleman “tidak demikian, dan tidak juga tindakan manusia itu tidak dikendalikan oleh struktur sosial, tindakan manusia selalu

tertuju pada pencapaian tujuan yang ditetapkannya sendiri, sehingga dalam setiap tindakan manusia pasti memiliki unsur rasionalitasnya” (Lawang, 2005: 90). Hambatan-hambatan yang dihadapi manusia dalam tindakan-tindakannya tersebut acapkali bisa ditembus, maka pilihan tindakan tetap dilakukan, acapkali pula tidak dapat ditembus maka dihindarinya. Perihal hambatan yang sulit ditembus lazimnya berupa struktur sosial makro obyektif yang biasanya bersifat *taken of granted*.

Konsepsi kapital sosial menurut Fukuyama (1995, 1999) pada dasarnya adalah segala ihwal jaringan sosial yang mempunyai makna. Aspek-aspek jaringan sosial, norma sosial, pertukaran dan norma sosial yang menghubungkan kebersamaan dalam rangka mencapai tujuan bersama, masuk dalam kategori ini. Kapital sosial dalam perbincangan ilmu-ilmu sosial menjadi pusat diskursus penting. Hal ini dapat disimak dari perjalanan terminologi ini hingga memasuki wacana akademis akhir abad ini.

Dalam studi yang dilakukan Putnam (1993), pertama kali wacana kapital sosial dikemukakan bukan oleh teoritis ilmu sosial namun oleh seorang praktisi pendidikan Hanifan yang pada tahun 1916 yang menemukan pentingnya campur tangan dan keterlibatan masyarakat untuk keberhasilan pendidikan dalam sekolah. Aspek-aspek

kemauan baik, kesertaan, simpati, dan pertalian sosial dalam sebuah masyarakat amat menentukan dicapainya pemenuhan kebutuhan bersama. Temuan itu untuk beberapa saat tidak banyak mempengaruhi perhatian para teoritis ilmu-ilmu sosial. Baru setelah 34 tahun, yaitu awal tahun 1950-an seorang sosiolog Kanada mengangkat tema kapital sosial yang menjadi karakteristik keanggotaan dari komunitas pinggiran kota. Berikutnya pada tahun 1960-an sosiolog perkotaan, Jacobs mengangkat persoalan batas-batas interaksi ketetanggaan dalam komunitas kota. Pada tahun 1970-an ekonom Loury menganalisis hukum-hukum sosial di kawasan kumuh dalam perspektif kapital sosial.

Sosiolog Bourdieu (1986) pada tahun 1980-an menganalisis bentuk-bentuk sumber-sumber sosial dan ekonomi yang dapat ditimbulkan dari jaringan sosial. Coleman (2000) melakukan hal yang pernah dilakukan Hanifan untuk menganalisis konteks sosial pendidikan. Pada akhir era 1990-an, Putnam (1993) menganalisis peran kapital sosial dalam proses demokratisasi dan tata kelola pemerintahan yang amanah (*good governance*) di Italia dan Amerika. Kemudian peran kapital sosial dalam proses modernisasi dan kapitalisme di Asia, Amerika dan Eropa yang ditulis Fukuyama (1999; 2000). Dari rangkaian temuan dan

kritik terhadap konsep kapital sosial beberapa teoritis memberikan variasi batasan kapital sosial.

Berbeda dengan kapital fisik dalam teori ekonomi yang merujuk konstruksi uang dan finansial, kekuatan kapital sosial terletak pada daya dongkraknya yang membesar tatkala diutilisasikan dalam interaksi sosial, semakin dipergunakan dan sering menjadi basis interaksi masyarakat, semakin besar timbunan atau stok kapital sosial. Apabila kapital fisik menunjuk pada aspek-aspek fisik dan sumberdaya manusia merujuk pada kekayaan dan keterampilan yang dikuasai oleh manusia, kapital sosial menunjuk pada "*tandem nilai kolektivitas*" dalam hubungan antar manusia. Kapital sosial, menurut Putnam (2000), ruangan sosialnya terletak di antara dua medan kesadaran interaksi dua pihak yang membangun pertukaran kepercayaan. Dengan kata lain kapital sosial bukan terletak pada masing-masing manusia, tetapi terpusat pada radius interseksi terjadinya proses interaksi sosial antar aktor. Kapital sosial yang paling esensial adalah *trust* dan *trustworthies*. Keduanya berperan memberikan iklim pelumasan (*lubricant*) sehingga kinerja dan dinamik kapital sosial itu menjadi stabil. Pada akhirnya kapital sosial dimaknai sebagai suatu nilai *mutual trust* (kepercayaan) antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya, kapital sosial juga

merupakan institusi sosial yang melibatkan jaringan (*network*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama. Lebih jauh Putnam memaknainya dengan contoh asosiasi horisontal yang tidak hanya memberikan manfaat *desirable outcome* (hasil pendapatan yang diharapkan) melainkan juga *undesirable outcomes* (hasil tambahan).

Satu konsep lain yang dekat dengan kapital sosial adalah konsep "*Kualitas Masyarakat*". Menurut Dahlan (1993: 3-22), kualitas masyarakat perlu untuk mewujudkan kemampuan dan prestasi bersama. Hal ini mencakup ciri-ciri yang berhubungan dengan kelangsungan masyarakat itu sendiri. Kualitas masyarakat ditelaah atas beberapa kelompok dengan detail sebagai berikut : (1) kehidupan bermasyarakat yang memiliki keserasian sosial, kesetiakawanan sosial, disiplin sosial, dan kualitas komunikasi sosial, (2) kehidupan sosial politik melalui level demokrasi, keterbukaan akses untuk partisipasi politik, kepemimpinan yang terbuka, ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi politik, serta keberadaan media massa, (3) eksistensi kehidupan kelompok, serta (4) adanya kualitas lembaga dan pranata kemasyarakatan dengan mempelajari kemutakhiran institusi dan kualitas,

kemampuan institusi menumbuhkan kemandirian masyarakat dan menjalankan fungsi yang baik, kualitas pemahaman terhadap hak dan kewajiban tiap orang, struktur institusi yang terbuka, dan mekanisme sumber-sumber yang potensial dalam membangkitkan daya kemasyarakatan secara berkelanjutan. Berdasarkan temuan penelitian, Woolcock dan Narayan (2000: 225-35) dalam menganalisis kapital sosial mengelompokkan dalam empat perspektif, yaitu : komunitarian (*communitarian*), jaringan (*network*), institusional (*institutional*) dan sinergi (*sinergy*).

Perwujudan kapital sosial dapat ditengarai sebagai sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan pengenalan timbal balik (atau dengan kata lain, keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif. Lebih jauh dijelaskan bahwa kapital sosial merupakan sesuatu yang berhubungan dengan yang lainnya, yaitu ekonomi, budaya, maupun bentuk-bentuk kapital sosial berupa institusi lokal maupun kekayaan sumber daya alamnya. Bourdieu (1986) tidak saja mengembangkan konsep kapital budaya, melainkan dua kapital lainnya, yaitu kapital ekonomi dan kapital

sosial dan hubungan antar ketiganya. Penjelasan Bourdieu tentang masing-masing kapital adalah seperti berikut :

- a. Kapital ekonomi, merupakan kapital yang dapat segera dan langsung ditukar dengan uang dan dapat dilembagakan dalam bentuk hak kepemilikan. Dalam konteks ini, dapat dibedakan kapital uang dan kapital kepemilikan. Kapital uang lebih merupakan alat tukar sedangkan kapital kepemilikan lebih bersifat kapital fisik yang sesungguhnya, maka uang sebenarnya bukan kapital dalam arti yang sebenarnya, melainkan sarana untuk dapat mengembangkan kapital fisik dan kapital manusia.
- b. Kapital budaya, merupakan kapital yang dalam kondisi-kondisi tertentu dapat ditukar dengan kapital ekonomi dan dapat dilembagakan dalam bentuk kualifikasi pendidikan atau keilmuan. Mengacu pada definisi ini, ada beberapa kesimpulan yang dapat ditegaskan, yaitu : (1) sesuatu yang bersifat atau ada hubungannya dengan kebudayaan yang tidak dapat ditukar dengan kapital ekonomi, tidak dapat disebut dengan kapital budaya, atau dengan kata lain, kebudayaan yang mempunyai nilai ekonomik dan secara potensial dan aktual dapat ditukarkan dengan uang sajalah yang disebut dengan kapital budaya. Pertanyaannya

adalah kebudayaan itu dari dirinya sendiri bukanlah kapital jika orang tidak berusaha untuk menuangkan kebudayaan itu. Jadi, nilai kapital suatu kebudayaan tergantung pada orang, bukan pada kebudayaan itu sendiri; (2) kapital kebudayaan itu mempunyai wujud yang nyata dalam bentuk ijazah/legitimasi, maka ia merupakan kapital kebudayaan. Ini dapat dibenarkan jika ijazah/legitimasi keilmuan merupakan sertifikat yang dipercayai orang sebagai kapital untuk bisa bekerja (*human capital*), artinya apa yang disertifikasikan itu mencerminkan kemampuan manusia dalam bentuk keahlian atau kepakaran atau ketrampilan. Inipun juga dipengaruhi oleh kemampuan pasar untuk menyerap tenaga manusia atau kepercayaan pasar. Dalam hal inipun ternyata kapital budaya bukanlah bersifat mandiri, oleh karena itu, kapital-kapital tersebut memiliki hubungan satu sama lain, dan malah dapat pula dipertukarkan; dan (3) kapital budaya memiliki 3 jenis kapital, yang menunjuk pada keadaan (*state*) yang memiliki 3 dimensi, yaitu : dimensi manusia secara fisik (badan), dimensi obyek yang berupa apapun yang dihasilkan manusia atau karya-karya manusia yang menjadikannya sebagai titik tumpu berproduksi atau ekonomi sejalan

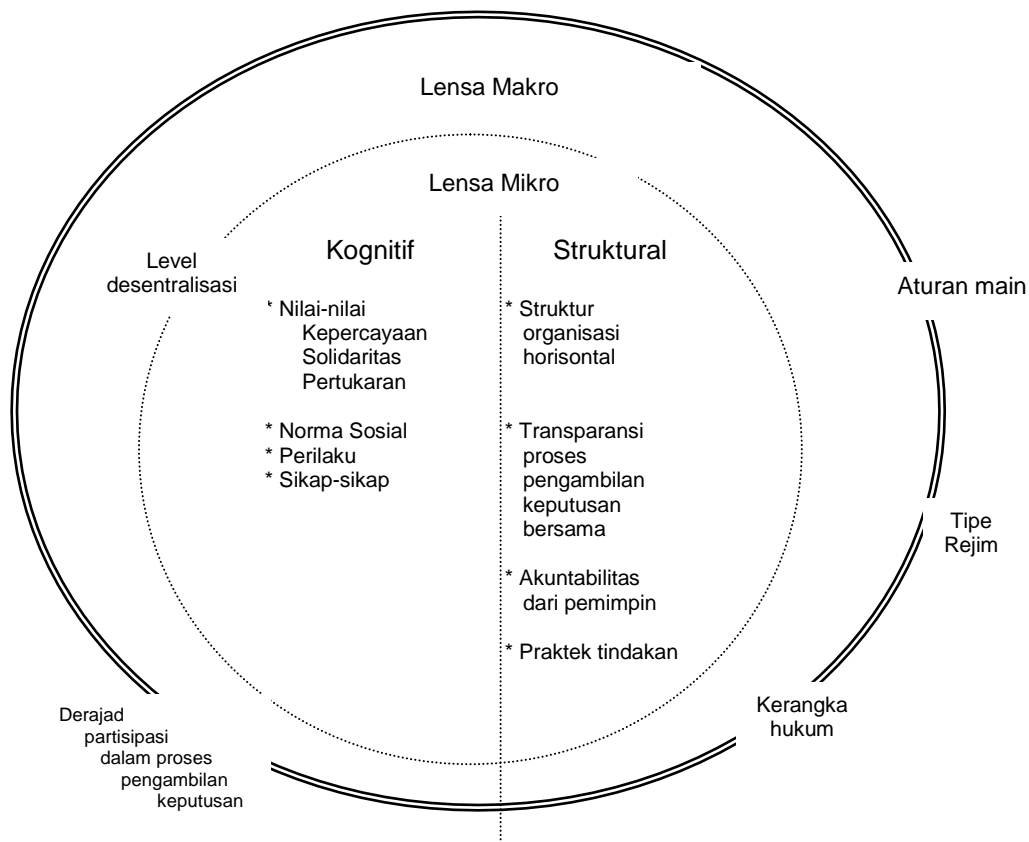
dengan manusia sebagai *homo economicus*, dan dimensi institusional, khususnya yang dimanifestasikan pada pendidikan atau keilmuannya.

- c. Jika kapital budaya lebih menunjuk pada keadaan, maka menurut Bourdieu, kapital sosial lebih menunjuk pada kondisi atau persyaratan yang mungkin dapat menjadi potensi untuk diaktualisasikan menjadi kekuatan tukar dengan kapital-kapital lainnya, misalnya kapital ekonomi, kapital politik, dan sebagainya. Kapital sosial pada akhirnya menunjuk pada kewajiban-kewajiban sosial ("koneksi") yang dalam kondisi tertentu dapat ditukar dengan kapital ekonomi, dan dapat

dilembagakan dalam bentuk titel bangsawan atau elit baru yang diperhitungkan atau kehormatan yang dapat menimbulkan kepercayaan pihak lain dalam pertukaran kapital ekonomi.

Dari keragaman pandangan-pandangan di atas, kapital sosial dalam kajian ini dapat distrukturasikan dalam dua aras kapital sosial, yaitu makro dan mikro. Studi yang dilakukan Krisna dan Schrader (1999) secara lebih terperinci mencoba merekonstruksi aneka kapital sosial dalam dimensi makro dan mikro. Pada tataran mikro kapital sosial dibedakan menjadi dua jenis yaitu dimensi kognitif dan struktural. Lebih lanjut penjelasan ini dapat diperhatikan pada gambar berikut :

Gambar 1.
Peta Konsep Jenis dan Hirarki Kapital Sosial



Sumber : diadaptasikan dari Anirudh Krishna and Elizabeth Shrader, 1999 : 9

Sementara itu Krishna dan Uphoff (1999), dalam pemetaan pengukuran kapital sosial, membagi dalam dua kategori besar : (a) kapital sosial struktural yang di dalamnya terdiri dari peraturan (*rules*), peranan (*roles*), jaringan sosial (*social network*), prosedur; dan (b) kapital sosial dimensi kognitif terdiri dari kapital sosial yang berorientasi kepada orang lain antara lain : kepercayaan (*trust*), resiprositas (*reciprocity*), solidaritas (*solidarity*). Kapital sosial kognitif yang berorientasi pada tindakan terdiri dari kerjasama, sifat kedermawanan atau sifat pemurah. Ahli lain Bullen dan Onyx (1998: 6-8) berdasar rangkaian penelitian di lima komunitas di New South Wales Australia, menyarankan delapan indikator kapital sosial tanpa mengkategorisasikan pada hirarki kognitif dan struktural. Kedelapan indikator tersebut adalah : (a) derajat partisipasi pada komunitas lokal; (b) proaktivitas dalam kegiatan sosial; (c) perasaan percaya dan aman; (d) tingkat koneksi atau hubungan ketetangaan; (e) tingkat koneksi keluarga dan pertemanan; (f) derajat toleransi pada keragaman; (g) nilai-nilai pedoman hidup; (h) dan jaringan kerja.

Dari berbagai temuan dan kajian mengenai kapital sosial, telah mampu mendefinisikan sejumlah indikasi potensi kapital sosial dalam kenyataan dinamika modernisasi yang terjadi di sejumlah

Negara sedang berkembang, yaitu : (1) kapital sosial sebagai kepercayaan sosial (*social trust*) (Fukuyama, 1995: 26), (2) kapital sosial sebagai pertukaran (*reciprocity*) (Putnam, 1993: 172), (3) kapital sosial sebagai jaringan (*networks*) (Fukuyama, 1999: 201-202), serta (4) kapital sosial sebagai norma (*norms*) atau kewajiban Sosial (Fukuyama, 1999: 148-149). Kajian kapital sosial di Indonesia telah menjadi perhatian Subejo (2004: 77-86), dengan mempertimbangkan elemen utama *social capital* yang terdiri dari *norms*, *reciprocity*, *trust*, dan *network*, maka sebenarnya hal tersebut secara historis bukan merupakan fenomena baru dan asing bagi masyarakat di Indonesia dan hal tersebut lebih berakar kuat dan terinstitusikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di daerah pedesaan, yang secara umum dikenal dengan kegiatan “*saling tolong-menolong*” atau secara luas terwadahi dalam tradisi “*gotong royong*”.

Tradisi gotong royong memiliki aturan main yang disepakati bersama (*norm*), menghargai prinsip timbal-balik dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dan dalam waktu tertentu akan menerima kompensasi/*reward* sebagai suatu bentuk dari sistem resiprositas (*reciprocity*), ada saling kepercayaan antar pelaku bahwa masing-masing akan mematuhi semua bentuk aturan main yang

telah disepakati (*trust*), serta kegiatan kerjasama tersebut diikat kuat oleh hubungan-hubungan spesifik antara lain mencakup kekerabatan--*kinship*, pertetanggan--*neighborship* dan pertemanan—*friendship* sehingga semakin menguatkan jaringan antar pelaku (*network*).

Tradisi gotong royong secara nyata telah melembaga dan mengakar kuat, ini diwujudkan dalam berbagai aktivitas keseharian masyarakat Indonesia. Khususnya di pedesaan Jawa, praktek gotong royong walaupun cenderung mengalami penurunan baik dari sudut pandang lingkup aktifitas maupun jumlah orang yang terlibat, namun secara umum masih mendapatkan apresiasi positif oleh warga masyarakat. Hal ini nampaknya juga dipengaruhi oleh salah satu karakteristik khusus yaitu keeratan hubungan sosial yang dimiliki oleh masyarakat Jawa.

Salah seorang peneliti terkemuka tentang masyarakat pedesaan, Scott (1976) telah mengkategorikan masyarakat pedesaan Jawa sebagai salah satu dari masyarakat pedesaan di dunia yang memiliki tradisi *communitarian* paling kuat. Kegiatan gotong royong terekspesikan dalam berbagai aktivitas mulai dari yang bersifat (1) sosial, (2) sosial dan personal serta (3) personal yang diwujudkan dalam bentuk pertukaran (*exchange*). Ditinjau dari bentuk yang dikerjasamakan, gotong

royong bisa mencakup material, tenaga, uang dan *social spirit*. Secara umum aktivitas gotong royong memiliki tema sentral sebagai *mutual help* antar anggota masyarakat yang mana masing-masing pihak terlibat saling memberikan kontribusi dan sebagai *reward*-nya mereka mendapatkan *gain* dari aktivitas yang dikerjasamakan. Semangat timbal balik--*reciprocity* melekat kuat sebagai penunjuk bahwa proses kerjasama berlangsung dengan *fair*. Dalam praktek nyata keseharian, timbal balik memiliki spektrum yang fleksibel dari timbal balik yang sangat ketat (*strict reciprocity*) sampai dengan timbal balik yang longgar (*non-strict reciprocity*). Dan bukan tidak mungkin dalam kasus-kasus tertentu terjadi ketidak seimbangan antara kontribusi dan *gain* yang diperoleh pihak terlibat dalam jangka panjang, namun karena warga masyarakat masih memegang prinsip *generosity*, hal itu diterima sebagai hal yang biasa dengan kebesaran hati.

Semangat kesepadan, dan rasa timbang rasa memungkinkan anggota masyarakat dari golongan kurang mampu atau terbelakang secara sosial dan ekonomi untuk memperoleh *gain* yang lebih besar dibandingkan dengan kontribusi yang diberikan kepada kelompoknya. Aktivitas gotong royong dalam berbagai dimensinya memberikan implikasi semangat dan *value* untuk saling memberikan jaminan/*self-*

guarantying atas hak dan kelangsungan hidup antar sesama warga masyarakat yang masih melekat cukup kuat di pedesaan. Hal ini juga dapat diacu sebagai salah satu strategi tradisional dalam *social safety net*. Subejo dan Iwamoto (2003) memberikan terminologi pada praktek gotong royong yang dilembagakan sebagai tradisi oleh warga pedesaan sebagai “*institutionalized stabilizers*” karena aktivitas tersebut memungkinkan proses keberlanjutan (*sustainability*) dan menjamin stabilitas secara ekonomi dan sosial pada kehidupan rumah tangga di pedesaan. Faktanya, modernisasi telah mengikis kultur pedesaan menjadi *urban*, bisa jadi gotong royong sebagai kapital sosial telah berubah, menurun kadar kualitasnya atau menjelma menjadi kelembagaan baru yang masih mempertahankan nilai-nilai dari gotong-royong tersebut.

KEPERCAYAAN (TRUST) DALAM BANGUNAN MASYARAKAT HARMONI

Secara umum, kapital sosial dipandang sebagai stok kapital yang penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat negara dunia ketiga maupun masyarakat negara industri maju sekalipun. Analisis kapital sosial, sebagai stok kapital dalam sebuah masyarakat memang sulit dipisahkan dari *theoretical way of thinking* yang dikembangkan oleh mazhab ekonomi *neo-klasik* (Black,1997), yang

mempostulatkan *utilitas maksimum* dan nilai *kegunaan ekonomi* sebagai thesis penting dalam teorinya. Akan tetapi, konsep kapital sosial tidak serta merta dimanfaatkan sebagai instrumen penting kearah akumulasi material dan ekspansi kapital serta maksimisasi keuntungan ekonomi, melainkan lebih dimaknai sebagai prasyarat terjadinya sebuah tata-ekonomi sehat yang rasional dan operasional. Dengan demikian, kapital sosial hanya memberikan energi (*social energy*) bagi berjalannya sebuah sistem sosial-kemasyarakatan.

Dalam perspektif *ekonomi neo-klasik*, individu-individu mendapat kesempatan untuk berpikir secara rasional dalam menentukan pilihan-pilihan atas tindakan sosial yang hendak diputuskannya. Artinya, setiap individu memiliki kebebasan menimbang “untung-ruginya” dalam memanfaatkan stok kapital sosial tersebut, terutama pada saat mereka hendak membuat keputusan membentuk suatu peradaban masyarakat yang efisien dan efektif. Kapital sosial (bersama-sama dengan berbagai bentuk kapital ekonomi lainnya seperti uang, kapital fisik seperti tanah dan mesin-mesin, keterampilan dan kemampuan atau *human capital*, serta kapital *lingkungan-ekologis*) bermakna instrumental bagi pencapaian sebuah tata-masyarakat ideal. Melalui perspektif ini, penggunaan teori-teori pilihan rasional (*the rational choice theory*) menjadi sangat

relevan dalam mengoperasionalkan dan memfungsikan kapital sosial (Little, 1991: 35-52, Hecter and Kanazawa, 1997: 191-214).

Dari perspektif fungsionalisme, kapital sosial yang berintikan struktur ikatan-ikatan sosial yang berurat-berakar secara luas, memiliki makna yang bersifat multi-aras. Portes (1998: 1-24) menyatakan *primordial social ties* sebagai bentuk kapital sosial “primitif” yang telah ada sejak lama, dan dari sinilah pemaknaan akan kapital sosial berlangsung. Ikatan primordialisme tersebut terjalin dalam jaringan dan ikatan kekeluargaan. Fenomena yang nampak pada masa Orde Baru, kapital sosial telah dimanfaatkan secara “tidak layak”, dimana *trust* dan jejaring sosial dibangun secara eksklusif untuk membentuk emperium bisnis dan politik berbasis kerabat dan kroni. Sementara itu, norma-norma sosial dibentuk oleh dan sesuai selera pemilik otoritas kekuasaan demi mengukuhkan kepentingan-kepentingan kroni tersebut di ruang bisnis dan politik. Kapital sosial pada masa itu dimanipulasi menjadi asset ekonomi kelompok tertentu dan bukan menjadi asset publik. Terlepas dari insiden buruk pemanfaatan kapital sosial oleh kekuasaan ekonomi-politik Orde Baru, makna kapital sosial dalam pengertian *traditional ties and social networking* tetap memiliki relevansi penting dalam kehidupan sosial Indonesia pada umumnya.

Fenomena lainnya, ditunjukkan oleh kajian-kajian *informal economy*, banyak temuan mengungkapkan bahwa sektor informal perkotaan dunia ketiga tumbuh dan berkembang sebagai akibat dari adanya perluasan jaringan sosial desa-kota. Jaringan tersebut memungkinkan sektor informal menyerap secara berlebihan tenaga kerja dari pedesaan. Kapital sosial yang dipunyai oleh kaum migran desa-kota itu secara tepat dan efisien mampu mengalokasikan sumberdaya manusia ke unit-unit usaha yang masih memiliki kapasitas untuk berkembang (Gertz, 1968, Gaughan & Ferman, 1998: 15-25, Reenoy, 1990, Lyn, 1999: 467-487).

Menurut perspektif strukturalisme, *trust* yang melandasi bangunan ikatan sosial itu akan lebih banyak menguntungkan elemen komunitas di tingkat individual, sehingga kapital sosial bermakna sebagai asset sosial-ekonomi yang dikuasai dan dilakukan oleh individu. Dalam perkembangannya, sebagian analis berpendapat bahwa ikatan-ikatan sosial tersebut memberikan keuntungan tidak hanya kepada individu semata, namun lebih kepada kolektivitas. Dalam konteks ini, kapital sosial bermakna sebagai *kapital kolektif* yang menopang bangunan sebuah sistem sosial. Sejumlah fakta dari studi-studi sosiologi pembangunan yang menjelaskan bahwa jaringan ikatan sosial dibentuk secara sengaja sebagai

infrastruktur komunitas – *purposively constructed institutions* (Dharmawan, 2002). Dari pemaknaan di atas, kapital sosial memungkinkan orang-orang secara bersama menyongsong sumber-sumber kehidupan (*sources of livelihoods*) dengan lebih baik, sehingga terbentuk masyarakat yang lebih sejahtera secara sosial-ekonomi (ukurannya : harmonis secara sosial, bebas konflik, tingkat kerjasama yang tinggi, makmur secara ekonomi, demokratis, santun, egaliter, dan sebagainya).

Berdasarkan uraian di atas, menjadi jelas bahwa dimensi kepercayaan (*trust*) dalam kapital sosial merupakan sumberdaya yang memiliki kemampuan substitusi maupun komplementer bagi sumberdaya atau kapital lainnya.

KAPITAL SOSIAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM : FENOMENA DI INDONESIA

Faktanya, pembangunan suatu bangsa tidak hanya berkaitan dengan kapital ekonomi (finansial), Beberapa hasil studi menunjukkan bahwa pembangunan tidak saja didorong oleh faktor ketersediaan sumberdaya alam, besarnya kapital finansial atau tingginya investasi ekonomi dan industrialisasi, melainkan juga bertautan dengan matra sosial, khususnya kapital sosial yang hanya dapat diwujudkan melalui usaha membangun masyarakat yang berperadaban.

Kapital Sosial dan Nilai-nilai Ke-Islam-an

Islam memiliki landasan kuat untuk melahirkan masyarakat yang beradab tersebut, komitmen pada kontrak sosial dan norma yang telah disepakati bersama. Membangun masyarakat dalam kacamata Islam adalah tugas ke-*kholifah-an*, kewajiban bagi setiap muslim. Bangunan sosial masyarakat muslim itu ciri dasarnya : *ta'awun* (tolong-menolong), *takaful* (saling menanggung), dan *tadhomun* (memiliki solidaritas).

Bangunan masyarakat yang mencirikan hal-hal di atas disebut masyarakat madani¹, di dunia Barat dikenal dengan istilah masyarakat sipil (*civil society*), adalah masyarakat dengan tatanan sosial yang baik, berazas pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dengan hak dan kewajiban sosial. Pelaksanaannya antara lain dengan terbentuknya

¹ Perdebatan atas istilah-istilah tersebut tetap saja terjadi, bukan selayaknya disini untuk memperdebatkan istilah-istilah tersebut yang bisa jadi tidak terdapatkan titik temunya. Penulis mengambil pengertian konsep masyarakat madani dari pandangan Nurcholis Madjid dalam artikel Menuju Masyarakat Madani yang dimuat pada situs Edi Cahyono's Page, yaitu masyarakat berbudi luhur atau berakhlak mulia. Hal ini sejalan dengan pandangan Robert N. Bellah dalam *Beyond Belief* (New York : Harper & Row, 1976, hal. 150-151), bahwa peradaban yang dibangun Nabi tersebut disebut sebagai masyarakat yang untuk zaman dan tempatnya sangat modern, sehingga setelah Nabi sendiri wafat tidak bertahan lama. Timur Tengah dan umat manusia saat itu belum siap dengan prasarana social yang diperlukann untuk menopang suatu tatanan social yang modern sebagaimana telah dirintis Nabi.

pemerintahan yang tunduk pada aturan dan undang-undang dengan sistem yang transparan. Masyarakat madani secara formal mengatur hubungan sosial antar komponen masyarakat. Postulat naqliyah dari khazanah ajaran Islam, mendokumentasikan dengan baik 15 abad silam, bagaimana masyarakat seperti itu ditumbuhkembangkan dalam kapital sosial yang kuat, dibuktikan dengan komitmen masyarakatnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban, sebuah masyarakat yang sarat dengan nilai dan moral, maju, beradab dan sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana realitas prakteknya pada masyarakat muslim di Indonesia dewasa ini ?

Pertama, dalam kaitan kapital sosial sebagai kapital politik, dengan menggunakan pendekatan *civic culture* dalam konteks Indonesia, penelitian Saiful Mujani (2003) memperlihatkan bahwa pertumbuhan peradaban masyarakat yang modern dan demokratis berakar dari kultur demokrasi itu sendiri, yang mencakup : keterlibatan kewargaan yang bersifat sekular (*secular civic engagement*), sikap saling percaya sesama warga (*interpersonal trust*), toleransi, keterlibatan politis (*political engagement*), dukungan terhadap sistem demokrasi, dan partisipasi politik (*political participation*). Penelitian tersebut menolak tesis yang menyatakan bahwa Islam tidak sejalan dengan demokrasi dan *civil society*.

Merujuk pada banyak pakar politik (seperti Anderson, Halliday, Entelis, Gerges, Tessler, Al-Braizat, Rose, Esposito dan Voll, Mousalli dll), serta studi lapangan, Mujani menjelaskan bahwa : (1) masyarakat Islam memiliki kapital sosial yang cukup bagi tumbuhnya demokrasi dan peradaban modern, (2) tingkat *civic engagement* di kalangan Muslim Indonesia cukup tinggi mencapai 38,9%; sebanyak 26 % terlibat dalam kelompok arisan; 15,5 % terlibat di organisasi tingkat desa; 8,7 % di organisasi pekerja; 5 % di koperasi; dan 2 % terlibat di klub olah raga, (3) tingkat toleransi masyarakat Muslim Indonesia pada tataran sikap terhadap kelompok tertentu, seperti komunis, Kristen, Islamis Muslim, Cina, Hindu, Budha dan seterusnya, tampak rendah, namun tidak melemahkan karakter peradaban yang terkandung dalam nilai-nilai masyarakat yang demokratis, dan (4) dukungan masyarakat Islam Indonesia terhadap institusi politik relatif rendah, meskipun tingkat partisipasinya cukup tinggi, baik secara konvensional maupun non-konvensional.

Kedua, dalam kaitan kapital sosial sebagai kapital budaya, patut disimak pandangan Amin Rais (2009) dalam mencermati pertumbuhan dan perkembangan Muhammadiyah lewat amal usahanya yang tidak sedikit, terutama dengan adanya sekolah-sekolah. Sebagai ORMAS Islam, Muhammadiyah sejak lama

telah mengembangkan doktrin yang disebut dengan *menggembirakan amal saleh*. Organisasi berfungsi untuk memobilisasikan atau dalam bahasa Muhammadiyah, untuk menggembirakan amal saleh kolektif (Rasul, 2010). Muhammadiyah membuktikan potensinya dalam pengembangan kapital sosial masyarakat, yang ditandai oleh kemampuan organisasinya mensemangati beramal dari berbagai individu Muslim yang dipadukan lewat sebuah organisasi, melalui pembagian kerja yang rapih. Apa yang tidak mungkin dikerjakan melalui kemampuan individual, akhirnya dapat dilaksanakan dengan baik melalui organisasi. Dipandang dari sisi kapital sosial, terbangunnya gerakan amal saleh secara kolektif tersebut di antaranya diwujudkan melalui usaha mendirikan sekolah-sekolah berbasis pada kekuatan jamaah di Muhammadiyah. Hal tersebut merupakan *trust* atau kepercayaan dari jamaah kepada pemimpin-pemimpin Muhammadiyah yang umumnya hidup sederhana atau jauh dari bermewah-mewah, jauh dari korupsi, ikhlas, tekun bekerja, dan tidak banyak bicara. Demikian halnya alam tradisi NU, sejumlah kegiatan kolektif yang berbasis pada kerjasama dan saling percaya dapat dikenali melalui aktivitas *yasinan*, *manakiban*, *tahlilan*, tujuh harian bagi orang yang meninggal, haul, dan lain-lain. Dalam penelitian Saiful Mujani (2003) menyajikan temuan bahwa berbagai

aktivitas kolektif tersebut mempunyai efek ganda, terdapat kecenderungan bahwa orang yang aktif dalam kegiatan tersebut ternyata juga aktif dalam organisasi-organisasi “sekuler”, aktivis NU tersebut umumnya aktif juga di organisasi Karang Taruna, PKK, dan klub-klub olah raga maupun seni budaya.

Ketiga, kapital sosial juga memiliki entitas dalam konteks kapital *ubudiyah*. Melalui berbagai amalan di bulan Ramadhanpun, menurut pandangan Hidayat Nahwi Rasul (2010) ternyata juga memberikan hikmah bagi pemupukan kapital sosial masyarakat. Dikatakannya, bilamana amalan-amalan tersebut dikerjakan dengan serius, melalui ibadah di bulan Ramadhan mampu meningkatkan kesalehan sosial, wujudnya adalah kesantunan, keberadaban, kerukunan, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Nilai hikmah semacam itu dapat menjadi kapital sosial dalam menghadapi badai krisis ekonomi global yang mengancam akibat gagalnya sistem kapitalisme global dalam mensejahterakan masyarakat dunia. Kapital sosial dalam perspektif Islam dapat pula dirupakan dalam bentuk jaringan sosial dan sikap manusia untuk bekerja sama, yang bisa muncul dalam pelbagai cara, seperti memenuhi kewajiban, penghormatan dan kesetiaan, solidaritas, kepercayaan dan pelayanan. Ahmad Sahidah (2009) mengkaji proses ritual korban memiliki

kandungan berbagai unsur kapital sosial tersebut. Bisa jadi setiap orang mampu selalu melakukan kurban pada setiap Idul Adha, terdapat pula cara perkongsian (7 orang dengan 1 ekor lembu) yang menyuburkan ikatan emosional dan kepedulian secara kolektif. Pembagian daging kurban menggambarkan pelayanan yang sempurna, karena mereka yang terlibat tak berharap pamrih (didasarkan rasa tulus ikhlas). Pembagian kerjapun tertata sedemikian rupa, kaum bapak menyembelih dan menguliti hewan yang dikurbankan, sedangkan kaum ibu memotongnya untuk dimasukkan ke dalam kantong plastik. Dibandingkan ibadah-ibadah yang lain, ritual kurban mempunyai signifikansi yang luas dalam konsep kapital sosial, karena mempunyai makna edukasi yang bisa menggugah anak-anak hingga orang dewasa terlibat di dalamnya.

Keempat, dalam kaitan kapital sosial menumbuhkan kapital ekonomi, Islam memiliki aktivitas nyata yang diwujudkan melalui program ZIS (Zakah, Sedekah dan Infaq) yang bernilai bagi peningkatan kesejahteraan *ummah* (Suharto, 2008). Dengan menggunakan indikasi-indikasi kapital sosial yang terdiri atas : norma, kerjasama permanen, kepercayaan dan jaringan; maka tradisi Islam dalam tolong menolong yang diwujudkan melalui *zakah*, *infaq*, dan *sedekah* merupakan fakta obyektif bagaimana kapital sosial itu

menjadi integral dengan nilai-nilai Islam. ZIS (*Zakah*, *Infaq* dan *Sedekah*) memiliki aturan main tertentu dan masyarakatpun memahami (*norm*), menghargai prinsip timbal-balik dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dan dalam waktu tertentu akan menerima kompensasi/*reward* sebagai suatu bentuk dari sistem resiprositas (*reciprocity*), ada saling kepercayaan antar pelaku bahwa masing-masing akan mematuhi semua bentuk aturan main yang telah disepakati (*trust*), serta kegiatan kerjasama tersebut diikat kuat oleh hubungan spesifik, seperti kekerabatan-*kinship*, pertetanggan-*neighborship* dan pertemanan—*friendship* sehingga semakin menguatkan jaringan antar pelaku (*network*).

Kekuatan nilai-nilai tersebut juga dilandaskan pada ajaran Islam mengenai *fi-sabilillah*, berkorban, persaudaraan sesama muslim, cinta sesama manusia dan *rahmatan lil 'alamiin*. Para aktivis ZIS tidaklah asing dengan hadits berikut ini, bahwa "Rasulullah SAW mengecam orang yang dapat tidur nyenyak sementara tetangganya tidak dapat tidur karena kelaparan". Orang jenis ini oleh Rasulullah SAW disebut sebagai tidak beriman. Fakta keberhasilan lembaga-lembaga ZIS di Indonesia, seperti Dompot Dhuafa, BMT-BMT ; merupakan fenomena adanya kapital sosial dalam perspektif Islam yang patut dipahami.

Uraian nilai-nilai Islam di atas, baru merupakan "*kapital sosial laten*". Sedangkan upaya pembangunan komunitas madani atau masyarakat yang berperadaban, merupakan usaha menggali dan memunculkan *kapital sosial laten* menjadi *manifes*, yakni mewujudkan pesan/ajaran Islam benar-benar menjadi ikutan banyak orang, didukung eksistensinya di sebuah komunitas. Tanpa proses pemupukan secara sistematis, selamanya *kapital sosial islami* hanyalah sebuah potensi, hanya menjadi materi ceramah keagamaan, atau diwujudkan secara parsial, tidak menyeluruh.

Menggagas Trust Society di Indonesia

Dalam bangunan masyarakat madani atau masyarakat ideal yang dicita-citakan oleh Islam, kepercayaan (*trust*) adalah sumberdaya yang memiliki kemampuan substitusi maupun komplementer bagi sumberdaya atau kapital lainnya. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, kontek ke-Indonesia-anpun membangun *trust society* menjadi perhatian yang perlu terus dikuatkan. Dengan memasukkan konsep *trust* ke dalam pola hubungan sosial dan struktur sosial kemasyarakatan Indonesia, maka bangunan masyarakat Indonesia, semestinya akan bisa lebih baik di masa depan.

Upaya mereduksi ciri moralitas

distrust in society bisa dilakukan dengan cara menanamkan dan menumbuhkan *trust* pada beragam aras, yaitu :

- 1) ***Trust*** pada aras **individu**, disini *trust* ditanamkan sebagai bagian tak terpisahkan dari moralitas dan adab yang selalu melekat pada karakter setiap individu;
- 2) ***Trust*** pada aras **kelompok** dan **kelembagaan**, adalah proses bagaimana menjaga amanah (*promise keeping*) di tingkat kelompok-kelompok sosial secara efektif.
- 3) ***Trust*** pada aras **sistem yang abstrak** (ideologi, religi) membantu setiap individu dalam merealisasikan *trust* dalam kehidupan kemasyarakatan.

Bila moralitas *trust* menjelma menjadi perilaku bersama (*collective behavior*) atau aksi kolektif, maka *trust society* tak mustahil akan mudah terwujud. Meski demikian, *trust* tak akan dapat berkembang dengan sendirinya tanpa adanya *favorable conditions*, yang mendukungnya untuk tumbuh dengan baik. Dalam hal ini, Narayan (1999) menilai bahwa *trust* merupakan salah satu *essential contributor factor* yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan suatu masyarakat dan secara signifikan membantu terciptanya harmoni kehidupan sosial dan integrasi sosial (*a unity in diversity*). Menjadi penting adanya *institusi formal* dan *informal* yang menjamin *trust* agar berfungsi secara

operasional. Adapun institusi informal yang bisa menumbuhkan *trust* semestinya memenuhi criteria; (1) *interpersonal relations* berkembang kondusif, (2) *norms and values* yang dikukuhkan bersama-sama serta diyakini dan ditaati oleh masyarakat, dan (3) adanya *social sanctions* yang mengikat orang atau kelompok agar tak berbuat semaunya. Selanjutnya pada sisi kelembagaan formal, *trust* akan bisa

tumbuh bila fungsi-fungsi organisasi, seperti : lembaga pendidikan, lembaga hukum, pasar, ikut menyumbang energi bagi tumbuh dan berkembangnya atmosfer moralitas *trust* dalam masyarakat. Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka model *trust society* yang dapat dihipotesiskan nampak seperti tabel berikut ini :

**Tabel 1:
Model Hipotesis Kualitas *Trust Society***

KUALITAS INTEGRASI SOSIAL	KUALITAS MORAL <i>TRUST</i>	
	MORAL DIS- <i>TRUST</i>	MORAL <i>TRUST</i>
DIS-INTEGRASI	Masyarakat dis-integrasi dengan kondisi masyarakat saling curiga	Masyarakat dis-integrasi, masih memiliki potensi moral saling percaya
INTEGRASI	Masyarakat integrasi namun kondisi masyarakat saling curiga	Masyarakat integrasi, masih dengan potensi moral saling percaya yang tinggi

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Studi yang dilakukan Tadjoeidin (2002) tentang realitas masyarakat di kawasan konflik (Maluku, Poso, Sampit, Aceh), berkesimpulan bahwa kondisi masyarakatnya pada derajat integrasi sosial sangat rendah dan derajat *distrust* yang tinggi, ditandai oleh adanya konflik sosial yang meluas, akibat rasa saling curiga yang amat-sangat tinggi. Dengan keadaan semacam itu, solusi hipotetiknya adalah mengusahakan terwujudnya masyarakat integratif yang didukung dengan potensi moral *trust* yang tinggi pula, yakni *trust society*. Dengan demikian, seluruh usaha

untuk menumbuhkan *trust* pada berbagai ranah (individu, kelompok, dan sistemik) harus dapat digerakkan secara optimal, baik pada level kelembagaan informal maupun formal. Tentunya berbagai langkah tersebut perlu dilakukan kajian awal (baseline) agar terpetakan realitas konflik dan saling curiga masyarakat, penyebab-penyebabnya dan institusi-institusi kunci yang dimungkinkan memiliki kontribusi untuk menciptakan moral *distrust* maupun dis-integrasi. Dengan demikian, proses relasi-relasi sosial baru dapat direkayasa untuk mendapatkan respon atau dukungan yang realistik dalam

menumbuhkan *trust society* di kawasan tersebut. Pola ini bisa jadi typical untuk menggerakkan iklim kemasyarakatan yang kondusif di Indonesia, dimana nilai-nilai ke-Islam-an dalam kapital sosial memiliki kontribusi yang patut diaktualisasikan.

PENUTUP

Berdasarkan review konsep kapital sosial, dapat didefinisikan sejumlah indikasi potensi kapital sosial dalam kenyataan dinamika modernisasi yang terjadi di sejumlah Negara sedang berkembang, yaitu : (1) kapital sosial sebagai kepercayaan sosial (*social trust*), (2) kapital sosial sebagai pertukaran (*reciprocity*), (3) kapital sosial sebagai jaringan (*networks*), serta (4) kapital sosial sebagai norma (*norms*) atau kewajiban Sosial.

Kajian kapital sosial di Indonesia telah menjadi perhatian sejumlah peneliti. Bilamana mempertimbangkan elemen utama *social capital* yang terdiri dari *norms*, *reciprocity*, *trust*, dan *network*, maka eksistensi kapital sosial secara historis bukan merupakan fenomena baru dan asing bagi masyarakat di Indonesia, dan hal tersebut lebih berakar kuat dan terinstitusikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di daerah pedesaan, yang secara umum dikenal dengan kegiatan “*saling tolong-menolong*” atau secara luas terwadahi dalam tradisi “*gotong royong*”.

Dengan menggunakan indikasi-

indikasi kapital sosial yang terdiri atas: norma, kerjasama permanen, kepercayaan dan jaringan; maka tradisi Islam dalam tolong menolong yang diwujudkan melalui berbagai ibadah ritual dan kultural umat Islam di Indonesia, seperti : *zakah*, *infaq*, *sedekah*, *tahlilan*, *manaqiban*, *kesalehan kolektif*, *ibadah di bulan Romadon*, *berkurbann pada saat Idul Adha*, dan *sejenisnya*, merupakan fakta obyektif bagaimana kapital sosial itu menjadi integral dengan nilai-nilai Islam. Berbagai kegiatan ubudiyah dan kesesalehan sosial tersebut memiliki aturan main tertentu dan masyarakatpun memahami (*norm*), menghargai prinsip timbal-balik dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dan dalam waktu tertentu akan menerima kompensasi/*reward* sebagai suatu bentuk dari sistem resiprositas (*reciprocity*), ada saling kepercayaan antar pelaku bahwa masing-masing akan mematuhi semua bentuk aturan main yang telah disepakati (*trust*), serta kegiatan kerjasama tersebut diikat kuat oleh hubungan spesifik, seperti kekerabatan-*kinship*, pertetanggan-*neighborship* dan pertemanan—*friendship* sehingga semakin menguatkan jaringan antar pelaku (*network*). Kekuatan nilai-nilai tersebut juga dilandaskan pada ajaran Islam mengenai *fi-sabilillah*, berkorban, persaudaraan sesama muslim, cinta sesama manusia dan *rahmatan lil 'alamiin*.

Dalam bangunan masyarakat madani atau masyarakat ideal yang dicita-citakan oleh Islam, kepercayaan (*trust*) adalah sumberdaya yang memiliki kemampuan substitusi maupun komplementer bagi sumberdaya atau kapital lainnya. Oleh sebab itu, membangun *trust society* menjadi perhatian yang perlu terus dikuatkan. Sebagaimana telah dipahami, bahwa hilangnya rasa saling percaya antar individu atau antar kelompok serta miskinnya *trust* dalam pengertian “ketidakmampuan dalam mengemban amanah” (*lower degree of social accountability*), baik secara interpersonal maupun institusional, akan berakibat pada dua hal penting, yaitu : (1) proses *disintegrasi sosial* yang menajam; dan (2) proses pemburukan ekonomi sebagai akibat in-efisiensi kelembagaan dan transaksi yang makin serius. Melihat pentingnya posisi dan peranan *trust* dalam kehidupan sosial kemasyarakatan Indonesia, maka kajian *trust society* menjadi agenda mendesak dalam sosiologi. Melihat potensi Indonesia yang terbesar penduduknya adalah muslim, maka mengintegrasikan tradisi atau budaya Islam sebagai proses membangun masyarakat Indonesia amat dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, PT. Sari Agung, Jakarta, 1997

- Ahmad Sahidah, *Kurban dan Modal Sosial*, Bening online, dikutip dari Harian Seputar Indonesia, Kamis 26 November 2009
- Amien Rais, *Muhammadiyah dan Kesalehan Kolektif*, dalam Almisar Hamid : "Faktor Modal Sosial Gerakan Muhammadiyah", makalah diskusi dosen FISIP Unmuh Jakarta, 27 Pebruari 2009
- Anirudh Krishna & Elizabeth Shrader, *Social Capital Assessment*, Prepared for the Conference on Social Capital and Poverty Reduction the World Bank, Washington D.C., 22-24 Juni 1999
- 'Abdul Rahman Ibn Khaldun, *Muqodimah Ibnu Khaldun*, al-Qohirah : Darul Fajri Iltirot. 1425 H
- Arya Hadi Dharmawan, *Kemiskinan Kepercayaan (The Poverty of Trust), Stok Modal Sosial dan Disintegrasi Sosial*, Makalah Seminar dan Kongres Nasional IV Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) bertemakan "Menggalang Masyarakat Indonesia Baru yang Berkemanusiaan", Bogor 27-29 Agustus 2002
- Bourdieu P., *The Form of Capital*, dalam Richardson J. G. (ed), *Handbook of Theory and Research for The Sociological of Education*, New York : Greenwood, 1986
- Black, J, *Oxford Dictionary of Economics*, Oxford university Press, New York, 1997
- Coleman, James, "Social Capital in the Creation of Human Capital", dipublikasikan oleh Dasgupta P. & Ismail Serageldin : *Capital Social : A Multifaceted Perspective*, 2000
- Dahlan, M. Alwi, *Menjabarkan Kulaitas dan Martabat Manusia dan Masyarakat*, hal. 3-22; disajikan dalam: Sofian Effendi et al. (eds), *Membangun Martabat Manusia: Peranan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Pembangunan*,

- Gajah Mada University Press Cet.2, 1993
- Edi Suharto, *Islam, Modal Sosial dan Pengentasan Kemiskinan*, Disampaikan pada "Indonesia Social Economic Outlook", Dompot Dhuafa, Jakarta, 8 Januari 2008
- Fukuyama, *Trust : The Social Virtues & The Creation of Prosperity*, New York : Free Press, 1995,
- Fukuyama, *The Great Disruption : Human Nature and the Reconstruction of Social Order*, Touchstone, 1999
- Gaughan & Ferman, *Toward an Understanding of the Informal Economy*. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 493, 1988
- Geertz, Clifford, *Peddlers and Princes: Social Change and Economic Modernisation in Two Indonesian Towns*, Chicago : Chicago University Press, 1968
- Hechter dan Kanazawa, *Sociological Rational Choice Theory*, Annual Review of Sociology, Vol. 23, 1997
- Hidayat Nahwi Rasul, *Puasa Mempertebal Modal Sosial*, Nuansa Persada online, 18 Januari 2010
- Lin, M., *Social networks and Status Attainment*, Annual Review of Sociology, Vol. 25, 1999
- Little, D., *Rational Choice Models and Asian Studies*, Journal of Asian Studies, Vol. 50/1, 1991
- Narayan, Deepa & Lant Pritchett, *Social Capital : Evidence and Implications*, dalam Dasgupta P. & Ismail Serageldin : *Capital Social : A Multifaceted Perspective*, tahun 2000
- Narayan, D., dalam *Bonds and Bridges Social Capital and Poverty*, Washington D.C : World Bank, 1999
- Nurcholis Madjid, *Menuju Masyarakat Madani* artikel dimuat pada situs Edi Cahyono's Page, yaitu masyarakat berbudi luhur atau berakhlak mulia
- Portes, Alejandro, *Social Capital : Its Origins and Applications in Modern Sociology*, Annual Review Social, 1998, Volume 24
- Reenoy, *The Informal Economy: Meaning, Measurement and Social Significance*, Elinkwijk bv. Utrecht, The Netherlands, 1990
- Robert N. Bellah, *Beyond Belief*, New York : Harper & Row, 1976
- Robert M. Z. Lawang, *Kapital Sosial*, Jakarta : FISIP UI Press, 2005
- Robert D. Putnam, Leonardi R. dan Nanetti R., *Making Democracy Work : Civic Traditions in Modern Italy*, Princeton : Princeton University Press, 1993
- Saiful Mujani, *Ritual Nahdhiyin, Modal Sosial dan Demokrasi*, temuan penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta tahun 2001 dan 2002, disajikan pada wawancara Burhanudin dengan Saiful Mujani, 13 Juli 2003
- Scott, James C, *The Moral Economy of The Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*, New Heaven and London, Yale University Press, 1976
- Subejo, *Peranan Kapital Sosial dalam Pembangunan Ekonomi : Suatu Pengantar untuk Studi Kapital Sosial di Pedesaan Indonesia*, Artikel dalam Jurnal Agro Ekonomi Vol.11. No.1 Juni 2004
- Subejo, Iwamoto, dan Noriaki, *Labor Institutions in Rural Java: A Case Study in Yogyakarta Province*, Working Paper Series No. 03-H-01, Department of Agriculture and Resource Economics, The University of Tokyo, 2003
- Tadjoeddin, M.Z., *Anatomi Kekerasan Sosial dalam Konteks Transisi :*

Kasus Indonesia 1990-2001,
UNSFIR Working Paper No. 02/01-
Jakarta, 2002

The World Bank, "*The Initiative on Defining, monitoring and Measuring Social Capital : Text of Proposal Approved for Funding*", Social Capital Initiative Working Paper No. 2. The World Bank, Social Development Family, Environmentally and Socially Sustainable Development Network, June 1998. Dalam <http://www1.worldbank.org/prem/poverty/scapital/wkrppr/sciwp2.pdf>. 9 Mei 2005